

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 November 2020/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
SUB UNIT KERJA : KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **H. BASMIN MATTAYANG**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **401275**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp.****854.030.000**

1. Tanah Seluas 125 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 16500 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1635 m2/168 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 234.030.000
6. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA LUWU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah Seluas 346 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp.****200.000.000**

1. MOBIL, MAZDA MINI BUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp.****126.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp.****----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	35.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.695.613.691
Sub Total	Rp.	3.910.643.691
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.910.643.691

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Januari 2021**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.